

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP WEWENANG
AHL AL-HALL WA AL-'AQD DAN RELEVANSINYA TERHADAP
FUNGSI DAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

FIKY AMALIA

1621020349

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP WEWENANG
AHL AL-HALL WA AL-'AQD DAN RELEVANSINYA TERHADAP
FUNGSI DAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**FIKY AMALIA
NPM: 1621020349**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1441H/2020M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* dan Relevansinya Terhadap Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.”**

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami judul skripsi ini:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹
2. *Fiqh Siyasah* adalah merupakan aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri.²
3. Wewenang adalah kekuasaan untuk bertindak.³
4. *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Adq* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas nama umat. Atau

¹ Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011)h. 1470

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, kontekstual Doktir Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grupp, 2014) h. 4

³ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi terbaru (Gramedia Press)

lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi suara masyarakat.⁴

5. Fungsi dan Tugas DPR adalah Dewan perwakilan Rakyat yaitu suatu lembaga tinggi negara yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat.⁵
6. Sistem Pemerintahan adalah suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan memengaruhi satu sama lain.⁶

Berdasarkan beberapa istilah yang telah penulis jelaskan di atas, maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu kajian mendalam tentang fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia ditinjau dari *fiqh siyasah*.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dalam memilih judul, sehingga penulis mengambil judul “ Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan Relevansinya Terhadap Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia” sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan DPR memiliki wewenang dalam pemerintahan. Namun memiliki perbedaan landasan dalam melaksanakan wewenang, fungsi, serta tugasnya dalam sistem pemerintahan.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gay Media Pratama, 2007) h. 138

⁵ Kansil, C. S. T., Kansil, Cristine C. S. *Sistem pemerintahan indonesia*, Edisi Revisi, cet. Keempat (Jakarta: Bumi aksara, 2011) h. 83

⁶ Iwan Satriawan, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 95

- b. *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan DPR memiliki hubungan dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam sistem pemerintahan.

2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan ini cukup relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Siyasah sehingga sesuai dengan ilmu yang didapat saat ini.
- b. Literatur bahan-bahan atau data-data yang diperlukan menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini tersedia di perpustakaan pusat, perpustakaan fakultas syari'ah UIN raden intan lampung, serta perpustakaan daerah provinsi lampung sehingga mendukung karya ilmiah tersebut.

C. Latar Belakang

Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd adalah istilah yang digunakan para ahli *Fiqh Siyasah* sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.⁷

Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd adalah para tokoh, ulama, pemimpin suku yang mempunyai fungsi dan wewenang:⁸

1. Pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, *Ibid.*, h. 155-156

⁸ Abdul Khalik Farid, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik Group, 2005) h. 82

2. Mengarahkan hidup masyarakat kearah yang maslahat.
3. Membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadits.
4. Konsultasi imam dalam menentukan kebijakan.
5. Mengawasi jalannya pemerintahan.⁹

Dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam (961-967 M) membentuk majelis as-syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara. Jadi, daulat Bani Umayyah II di Spanyol legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiah yang berkuasa di Damaskus.

Pembentukan lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam.¹⁰

Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat atau DPR sebagai representasi dari kehendak rakyat.¹¹ Istilah lembaga perwakilan di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan

⁹ Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003) h. 74

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,....*Ibid Ibid.*, h. 163-164

¹¹ *Ibid.*, h. 165

Rakyat atau disingkat dengan DPR. Dewan perwakilan rakyat adalah Lembaga Tinggi Negera yang terdiri dari wakil-wakil rakyat. Secara umum dipahami oleh masyarakat, fungsi DPR meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi *budget*. Di antara ketiga fungsi itu, biasanya yang paling menarik perhatian para politisi untuk diperbincangkan adalah tugas sebagai pemrakarsa pembuatan undang-undang. Namun, jika ditelaah secara kritis, maka tugas pokok yang pertama yaitu sebagai pengambil inisiatif pembuatan undang-undang, dapat dikatakan mengalami kemunduran serius pada akhir-akhir ini.¹²

Pergeseran kewenangan membentuk undang-undang dan yang sebelumnya ditangan presiden dan dialihkan kepada DPR merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga negara sesuai dengan tugasnya masing-masing yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif).¹³

Di dalam UU No. 2 Tahun 2018 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPD, ditegaskan bahwa DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Masa jabatan Anggota DPR

¹² *Ibid.*, h. 165

¹³ Zuhraini, *Tata Negara Indonesia, Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen Edisi Kedua* (Bandar Lampung: Penerbit Fakultas Syari'ah 2017) h. 133-136

adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPR yang baru mengucapkan janji/sumpah.¹⁴

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.¹⁵

Indonesia merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat serta merupakan negara kesatuan berbentuk Republik. Sebagai negara hukum Indonesia harus memenuhi konsep negara hukum yaitu sebagai Negara berdasarkan konstitusi, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak, artinya kekuasaan Negara diatur dan dibagi menurut hukum.¹⁶ Bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.¹⁷

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Secara demikian sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 68

¹⁵ Zuhraeni, *Tata Negara Indonesia....*, Ibid. h. 138

¹⁶ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 59.

¹⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008) h. 107

yang hubungannya satu sama lainnya. Menurut Jimly, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara.¹⁸

Sistem pemerintahan Indonesia yang dianut setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial:

1. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus merangkap kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat maka tidak bertanggung jawab kepada parlemen baik DPR maupun MPR.
3. Presiden dan DPR menempati kedudukan yang sejajar sehingga presiden tidak berwenang untuk membubarkan parlemen.
4. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
5. Presiden melaksanakan tugas dan wewenang selama lima tahun atau dalam masa jabatan yang tetap (*fixed term*).¹⁹

Dari penjelasan di atas, maka perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan relevansinya terhadap fungsi dan tugas DPR dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dalam sistem pemerintahan kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan strategis dalam pemerintahan, namun memiliki hubungan landasan dalam melaksanakan kedudukannya tersebut. Bahwa wewenang *Ahl Al-Hall Wa*

¹⁸ Iwan Satriawan, Siti Khoiriyah, *Ilmu Negara* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 95.

¹⁹ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 93-94.

Al-'Aqd memiliki relevansi terhadap fungsi dan tugas DPR dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu penelitian konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau pengalisan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.

Dengan demikian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan memiliki relevansi terhadap fungsi dan tugas DPR dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

E. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan apa saja wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* fungsi dan tugas DPR perspektif *Fiqh Siyasah*?
2. Bagaimana wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan relevansinya terhadap fungsi dan tugas DPR dalam sistem pemerintahan di Indonesia?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap fungsi dan tugas DPR dalam sistem pemerintahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan relevansinya terhadap fungsi dan tugas DPR dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

G. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi atau manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di fakultas syari'ah dan hukum, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* memiliki relevansi terhadap fungsi dan tugas DPR dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
- b. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* memiliki relevansi terhadap fungsi dan tugas DPR dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Secara Praktis

1. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum

ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Memberikan sumbang khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang wewenang *Ahl Al- Hall Wa Al- 'Aqd* memiliki relevansi terhadap fungsi dan tugas DPR dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dan penelitian terdahulu.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur yang ada dan fenomena tertentu.

2. Data dan Sumber Data

Guna memperoleh data hukum yang akurat untuk penulisan ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari dua cara yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan

sumber bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai sumber data tersebut. Yaitu:

- a. Sumber bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yakni Al-Qur'an dan Hadits, UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya.
- b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung, seperti buku-buku tentang DPR, Hukum Tata Negara, Pemikiran Politik Islam, dan buku-buku tentang Fiqh Siyasah serta literatur lainnya.
- c. Sumber bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum sebagai pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, jurnal hukum, kamus hukum, dan artikel-artikel yang dapat mendukung penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada umumnya memiliki beberapa pendekatan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²⁰ Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi yang meliputi sumber data primer yaitu catatan-catatan sejarah yang terkait dengan permasalahan sumber data sekunder yaitu buku-buku literatur tentang sejarah peradaban Islam, fiqh siyasah, ilmu

²⁰Abdulkadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Aditya Bakti, 2004) h. 38

pemerintahan, ilmu negara, serta tulisan-tulisan lain termasuk media internet untuk mengakses bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.²¹

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Setelah semua sumber data diatas yang berhubungan dengan data diatas sudah terkumpul, maka pengolahan data meliputi:

- a. *Editing*, adalah proses pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak lagi logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangan tersebut dapat dilengkapi dan diperbaiki.²²
- b. *Sistemazing*, adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²³
- c. *Koding*, adalah membuat klasifikasi data-data dan bahan-bahan serta mengelompokkan menurut bagiannya masing-masing, kemudian dipilih mana yang sesuai dengan pokok bahasan.

5. Metode Analisis Data

Analisa data kualitatif adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan-satuan

²¹ *Ibid*, h. 126

²² Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: 2015) h.115

²³ Abdulkadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum....*, *Ibid.*, h. 127

dasar.²⁴ Analisa data diperoleh dan selanjutnya dianalisis, metode pendekatan komparasi yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, antara variabel satu dengan variabel yang lain untuk mendapatkan suatu persamaan.²⁵



²⁴ Susiasi AS, *Metodologi Penelitian....*, *Ibid.*, h. 128

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM 1987),
h. 6

BAB II

KEDUDUKAN DAN WEWENANG *AHL AL-HALL WA AL-'AQD* PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Fiqh Siyasah* dan Ruang Lingkupnya.

Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahanpun disebutkan. Dari ide dasar itu *fiqh siyasah* dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk berasal dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*.¹ Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah khusus dibidang hukum Islam atau yurisprudensi Islam. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*.² Secara bahasa *fiqh* adalah paham yang mendalam. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), *fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahdin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum

¹Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h.2

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar Rhasyidin*(Bandung : Pustaka Setia, 2010) H.13

Islam, karena fiqh bersifat *ijtihadiah*. Pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu.³

Secara bahasa, *siyasah* artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat *sasa al-qaum*, mengatur kaum memerintah dan memimpin. *Siyasah* diartikan pula sebagai politik sebagaimana uraian-uraian ayat-ayat Al-Qur'an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukum. Kata itu pada mulanya menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan. Dari akar kata yang sama terbentuklah kata hikmah yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata *sasa yasusu siyasah* yang artinya mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian.

Fiqh siyasah membicarakan perundang-undangan, yang menyangkut peraturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antarlembaga negara. *Fiqh siyasah* merupakan bagian

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*...., *Ibid.*, h.2-3

dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.⁴ Itulah sebabnya makna *fiqh siyasah*, fiqh dan siyasah terlebih dahulu harus kita pisahkan, sehingga perbedaannya jelas. Dan fiqh didasarkan pada ciri-cirinya indentik dengan syariah. Oleh sebab itu, *fiqh siyasah* yang dimaksud adalah sama dengan *siyasah syar'iyah*.⁵

Siyasah syar'iyah politik yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan. Ide dasar berpolitik berpegangan pada prinsip-prinsip hukum Islam, sedangkan secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. *Siyasah syar'iyah* mempunyai posisi yang menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap realitas kekuasaan.⁶ Sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah Al-Qur'an dan Al-sunnah.

Maka dari itu ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan peraturan kehidupan manusia.
- b. Peraturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amr*).
- c. Tujuan peraturan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).

⁴ *Ibid*, h. 3

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar Rhasyidin....*, *Ibid.*, h.25

⁶ *Ibid*, h. 41

- d. Peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan semangat syariat Islam yang universal.⁷

Pembagian *fiqh siyasah* disederhanakan menjadi tiga bagian pokok:

1) Politik Perundang-Undangan (*siyasah dusturiyah*).

Konstitusi disebut dengan *dusturi*, meliputi pengkajian tentang hukum (*tasyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif yaitu kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum, peradilan (*qadha'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.⁸

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- b) Persoalan rakyat, status, dan hak-hak.
- c) Persoalan bai'at.
- d) Persoalan wahitul ahdi.
- e) Persoalan perwakilan.
- f) Persoalan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*.
- g) Persoalan wizaroh dan perbandingannya.⁹

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*...., *Ibid.*, h. 6.

⁸ *Ibid*, h. 15

⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prebnada Media Gruop), 2007. h.47

Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam merumuskan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.¹⁰

Namun kita lihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dibagi menjadi:

- (1) *Bidang siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*, perwakilan persolan rakyat. Hubungan Muslim dan non-Muslim dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, dan peraturan daerah.
- (2) *Bidang siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'at, wuzaroh, waliy al-ahdi.
- (3) *Bidang siyasah qadla'iyah*, ternasuk di dalamnya masalah peradilan.
- (4) *Bidang siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah administratif dan kepegawaian.¹¹

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, *Ibid.*, h. 178

¹¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, *Ibid.*, h.48

2) Politik Luar Negeri (*siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah*)

Mencangkup hubungan keperdataan antara warga negara Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-dauliyah al-khashsh*) atau disebut hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-dauliyah al-amm*) disebut dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Hubungan internasional mengatur politik kebijakan negara Islam dalam masa perdamaian perang. Hubungan dalam masa damai mencangkup tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa, tugas dan kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut tentang dasar-dasar perizinan berperang, etika berperang, kewajiban berperang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama dalam siyasah dauliyah dan dijadikan ukuran siyasah dauliyah berjalan sesuai dengan semangat Al-Islam atau tidak, adalah:

- a) Kesatuan umat manusia, antara lain surat Al-Imran ayat 19 Al-Qur'an banyak mengisyaratkannya

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
 أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ
 النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٩﴾

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S Al-Imran (3):19)

Ayat diatas menunjukkan kesatuan umat manusia untuk tidak bercerai-berai, bermusuhan, agar mempersatukan tujuan demi mencapai kemaslahatan bersama.

b) Al-‘Adalah (Keadilan). Surah Al-Maaidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
 شَأْنُ أَنْ يَجْرِمَنَّكُمْ قَوْمٌ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maaidaah (5):8)

Ayat diatas menjelaskan tentang keadilan untuk umat semua umat manusia, tidak membedakan kaya, miskin, baik buruk, dari kalangan bawah maupun kalangan teratas.

c) *Al-Musawah* (Persamaan) surah An-Nahl ayat 90

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٩٠﴾

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S An.Nahl (16):90)

Ayat diatas menjelaskan tentang persamaan anatara umat , laki-laki dan perempuan, menciptakan banyak suku dan berbangsa bangsa agar saling mengetahui dan mengenal satu sama lain.

d) *Karomah insaniyah* (Kehormatan Manusia) surah Al-Hujuraat ayat 11

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Hujuraat (49):11)

Ayat diatas menjelaskan tentang kehormatan diri seseorang, anatar laki dan perempuan tidak boleh saling melecehkan, menjelek-jelekkan, menuduh, merendahkan serta mentertawan satu sama lain, jkarna semua umat kita harus saling mnjaga kehormatan.

e) *Tasamuh* (Toleransi) surah Al-A'raaf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S Al-A'raaf (7):199)

Ayat diatas menjelaskan tentang toleransi antara sesama umat muslim, saling menghargai satu sama lain. Serta menjadi manusia yang pemaaf.

f) Kerja Sama Kemanusiaan. Surah Al-Maaidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلْتِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S Al-Maidaah (5):2)

Ayat diatas menjelsakn tentang kerja sama kemanusiaan, saling menolong satu sama lain, saling mengingatkan kepada kebaikan, ketakwaan.

g) Kebebasan, Kemerdekaan/ *Al-Huriyah*. Kebebasan berpikir Ar-Ruum ayat 8

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾

"Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya". (Q.S Ar-Ruum (30):8)

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebebasan berpikir seseorang agar berpikir tetap di jalan allah, melaksanakan perintah allah dan mejauhi larangannya

Kebebasan beragama dalam surah Al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah (2):256)

Ayat diatas menjelaskan tentang kebebasan seseorang dalam beragama, tidak boleh seseorang memaksa seseorang lainnya untuk memasuki agama yang ia yakini, karena dalam beragama tidak boleh adanya paksaan apapun.

Kebebasan menyatakan pendapat dalam surah Yunus ayat 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُهُ حَتَّى النَّاسِ
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”. (Q.S Yunus (10):99)

Ayat di atas menjelaskan tentang kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapatnya asal tidak keluar dari ketentuan dan etika.

Kebebasan menuntut ilmu dalam surah Al-Qashash ayat 77

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
 وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
 مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
 ﴿٧٧﴾ دَرَجَتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al- Qashash (28):77)

Ayat diatas menjelaskan tentang kebebasan seseorang dalam menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun.

Kebebasan memilih harta dalam surah Ath Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

(Q.S At-Thalaq (65):7)

Ayat di atas menjelaskan tentang kebebasan seseorang memilih harta, memilih sumber harta yang halal seata bukan harta yang riba.

h) Perilaku moral yang baik (*Al-Akhlak al-karimah*) Al-Qashash ayat 5

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)”. (Q.S Al-Qashash (28):5)

Ayat di atas menjelaskan tentang perilaku moral yang baik, sebagai manusia kita dituntut untuk berperilaku baik dan santun sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.

3) Politik Keuangan Negara (*siyasah maliyyah*)

Mencangkup sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, zakat, pajak dan perbankan¹².

Dalam *siyasah maliyyah* ada hubungan di antara tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin. *Siyasah maliyyah* membicarakan kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini.¹³

Dalam kaitannya dengan wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* maka *fiqh siyasah* yang digunakan adalah *fiqh siyasah dusturiyah*, Politik Perundang-Undangan (*siyasah dusturiyah*). *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

¹² *Ibid*, h.15-16

¹³ Djazuli, *Fiqh Siyasah*...., *Ibid.*, h.178

mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- b) Persoalan rakyat, status, dan hak-hak.
- c) Persoalan bai'at.
- d) Persoalan wahitul ahdi.
- e) Persoalan perwakilan.
- f) Persoalan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*.
- g) Persoalan wizaroh dan perbandingannya.¹⁴

Konstitusi disebut dengan *dusturi*, meliputi pengkajian tentang hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif yaitu kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum.¹⁵ Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*, perwakilan persolan rakyat. Hubungan Muslim dan non-Muslim dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, dan peraturan daerah.¹⁶

Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam merumuskan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata

¹⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prebnada Media Gruop), 2007. h.47

¹⁵ *Ibid*, h. 15

¹⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, *Ibid*., h.48

hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.¹⁷

2. Pengertian dan Sejarah *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

a. Pengertian *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Secara bahasa atau etimologi, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah dalam Bahasa Indonesia artinya orang-orang yang melepas dan mengikat. Dalam literatur fiqh, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* ialah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengikat dan membubarkan, yaitu membuat keputusan-keputusan dan bisa juga dikatakan “Majelis Syuro”.

Secara etimologis, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* banyak pendapat yang mengatakan:

- 1) Menurut Abd Al Hamid Anshori bahwa *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* ialah orang-orang yang berwenang untuk merumuskan serta memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintah yang didasarkan pada prinsip musyawarah.
- 2) Imam al-Mawardi mengemukakan pendapat bahwa dalam kajian fiqh siyasah terdapat kesamaan antara Majelis Syuro, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*, *ahlul jihad* dan *ahlul ak-ikhtiar*. Konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* telah populer semasa pemerintahan ataupun pada masa Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, namun hanya ide konsep itu mengemuka

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, *Ibid.*, h. 178

pada masa kepemimpinan Umar, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan gagasan mereka, tetapi belum berbentuk secara tegas.

- 3) *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* menurut al-Baghdadi adalah mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang-bidang khusus semisal hukum, politik, ekonomi dan sebagainya. Mereka juga memiliki kemampuan di bidang lain yang manopang peran mereka, juga memiliki kemampuan di bidang lainnya yang mendukung peran sebagai wakil rakyat dalam menentukan kebijakan demi kemaslahatan, di samping juga para wakil rakyat untuk menentukan pemimpin mereka.

Secara bahasa *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* terdiri dari tiga kalimat:

- a) *Ahl*, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki).
- b) *Al-Hall*, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan.
- c) *Al-'Aqd*, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk.¹⁸

Islam mewajibkan kepada penguasa untuk bermusyawarah dalam perkara umum, namun tidak menemukan baik di dalam Al-Qur'an atau sunnah sebutan spesifikasi apa yang disebut dengan

¹⁸ Abdul Hanan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat....*, *Ibid.*, h.106.

Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd.¹⁹ Secara harfiah, *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* berarti orang-orang yang dapat memutus dan mengikat. *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* adalah istilah yang digunakan para ahli *Fiqh Siyasah* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.²⁰

Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd merupakan salah satu istilah yang dipakai pada masa pemerintahan Islam dahulu yang dalam konteks sekarang dikenal sebagai lembaga legislatif atau parlemen. Sejarah membuktikan bahwa ternyata dalam sistem pemerintahan Islam sejak pada sahabat mereka sudah melaksanakan kerja lembaga ini walaupun belum menjadi satu lembaga atau lembaga yang bersifat independen dalam pemerintahan.²¹

Istilah *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* mulai timbul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli fikih setelah Rasulullah saw. Mereka berada di antara orang-orang yang dinamakan dengan *Ash-Shahabah*.²²

Istilah *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* berasal dari tiga suku kata yakni, *ahlun* yang artinya ahli atau *family* atau keluarga, *haallun*

¹⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: AMZAH, 2005), h.78

²⁰ *Ibid*, h. 155

²¹ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h.105

²² Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam....*, *Ibid.*, h.78

yang artinya membuka atau menguraikan, dan *aqdun* yang artinya perjanjian. Dari tiga suku kata tersebut disimpulkan bahwa *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukan kepada rakyat untuk dibai'at oleh mereka.²³

Ada beberapa pendapat Istilah *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Sekelompok orang yang memilih dan membai'at imam atau kepala negara atau disebut dengan istilah *ahlul al-ikhyar*.
- (2) Sekelompok orang yang mempunyai wewenang untuk mengikat dan melonggarkan. Istilah ini dikemukakan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang yang berhak menjadi wakil umat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat atau suara rakyat.
- (3) Sekelompok orang yang mampu menemukan penyelesaian masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan rakyat yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, kepala suku, atau golongan tertentu.
- (4) Para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur- unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan

²³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), H.2

kemaslahatan umat/rakyat disebut dengan istilah *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*.²⁴

Beberapa pandangan para ahli hukum Islam (*fuqh*) tentang pengertian *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*:

- (a) An-Nawawi dalam *Al-Minhaj*, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah para ulama, sesepuh, dan pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
- (b) Muhammad Abduh, menyamakan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dengan *ulil amri* yang disebutkan dalam surat *An-Nisa* ayat 59. Ia menafsirkan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* atau *ulil amri* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada di masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah golongan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan politik.
- (c) Rasyid Ridha, juga berpendapat *ulil amri* adalah *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*. Ia menyatakan kumpulan *ulil amri* dan mereka yang disebut *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah

²⁴ Jubair Situmorang, *Politik Kewarganegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), H. 256

mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari ulama, pemimpin militer, pemimpin pemimpin pekerja untuk kemaslahatn publik.

(d) Al Razi, juga menyamakan pengertian *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan *ulil amri*, yaitu para pemimpin dan penguasa.

(e) Al-Maraghi, merumuskan persamaan seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Ridha Rasyid.²⁵

Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd adalah *ahlul ikhtiar* dan mereka adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya sebutan kelompok *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dalam *turats* fikih sejak awal Islam, yang meraka adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau *Ahlul Iikhtiar*, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih dan menobatkan khalifah juga memberhentikannya, yang erdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat, menguatkan kekuasaan besar yang dimiliki kelompok *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan jelas menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan lembaga legislatif.²⁶

Pembentukan lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan

²⁵ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat....*, *Ibid.*, h.106-107

²⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam....*, *Ibid.*, h.79

kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para *ahli fiqh siyasah* menyebutkan beberapa alasan penting pelebagaan mejelis *syura*, yaitu:

- 1) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapat tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
- 2) Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal ini dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.
- 3) Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah peserta terbatas. Jika seluruh dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tidak dapat terlaksana.
- 4) Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.

- 5) Kewajiban taat kepada *ulu al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
- 6) Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah sebagaimana dalam surat Al-‘Imran ayat 159.²⁷

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S Al-Imran (3):159)

Ayat di atas menjelaskan tentang musyawarah sesama umat dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dalam negara tersebut.

b. Sejarah perkembangan lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd*

1) Pada Masa Rasul

Pada masa Rasulullah juga sudah dibentuk lembaga musyawarah atau disebut dengan lembaga syura. Lembaga ini dibentuk oleh Rasul setelah turun perintah Allah dalam surat

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...., Ibid.*, h. 163-165

asy-Syura:42 kepada umat Islam agar selalu mengedapkan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Lembaga syura ini difungsikan pada saat itu terutama sekali dalam permasalahan politik dan peperangan.

2) Masa Khulafa Rasyidin

Pada masa Khulafa Rasyidin pengangkatan empat orang sahabat menjadi khalifah dilakukan dengan mekanisme berbeda:

- a) Pemilihan bebas dan terbuka melalui forum musyawarah tanpa ada seorang calon sebelumnya. Mekanisme pemilihan seperti ini terjadi pada masa musyawarah terpilihnya Abu Bakar di Balai Pertemuan Tsaqifah Bani Sa'idah.
- b) Pemilihan dengan cara pencalonan atau penunjukan calon oleh khalifa sebelumnya dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan para sahabat terkemuka dan kemudian diberitahukan kepada umat dan mereka menyetujuinya. Penunjukan ini bukan karena nepotisme (hubungan keluarga atau persahabatan antara khalifah yang mencalonkan dengan calon yang ditunjuk) melainkan karena kualifikasinya. Mekanisme pemilihan ini digunakan ketika penunjukan Umar oleh Khalifah Abu Bakar.

c) Pemilihan tim formatur atau majelis syura yang dibentuk khalifah sebelumnya. Anggota tim bertugas memilih salah seorang di antara mereka menjadi khalifah. Mekanisme ini digunakan ketika pemilihan Usman bin Affan melalui majelis syura yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khatab yang beranggotakan enam orang, yakni Ali bin Abu Thalib, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqas, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidullah, serta Abdullah bin Umar tanpa punya hak suara. Tim ini dibekali oleh Umar dengan nasihat dan petunjuk.

d) Pengangkatan spontanitas di tengah-tengah situasi yang kacau akibat pemberontakan sekelompok masyarakat Muslim yang menuntut keadilan atas pembunuhan Usman bin Affan. Mekanisme ini terjadi pada pengangkatan Ali bin Abu Thalib oleh sebagian besar kaum Muslimin di Madinah.

3) Pasca Khulafa Rasyidin

Pembentukan lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* pertama dilakukan oleh pemerintahan Bani Umaiyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk *majelis as-syuro* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis

as-syuro ' ini setingkat dengan pemerintah. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara.

Meskipun ada lembaga syura seperti tersebut, tetapi pada masa ini mekanisme pengangkatan khalifah pada umumnya dilakukan melalui penunjukan putra mahkota, yakni penunjukan yang dilakukan oleh khalifah kepada putra atau keturunannya. Mekanisme pengangkatan ini melahirkan pemerintahan monarki, dinasti, atau kerajaan, seperti Dinasti Umayyah yang berkuasa sejak 41 sampai 132 H dan Dinasti Abasiyyah (132-652 H/750-1285 M).²⁸

4) Pada Zaman Modern

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik Barat terhadap Dunia Islam, pemikiran tentang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* juga berkembang. Al-Anshari berpendapat dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan beberapa cara, yaitu:

- a) pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* sesuai dengan pilihannya.

²⁸ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat....*, Ibid., h.110-113

- b) Pemilihan anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemjudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*.
- c) Ada juga anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* yang diangkat oleh kepala negara.

3. Dasar Hukum *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Surah An-Nisaa' ayat 58-59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S An-Nisaa’(4):58)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisaa’(4):59)

Ayat di atas menjelaskan sesungguhnya Allah menyuruh menjalankan amanah kepada pemiliknya. Dan menyuruh apabila kalian memutuskan suatu perkara, maka putuslah perkara tersebut dengan adil, serta jangan memihak dan berlaku dzalim. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberikan bimbingan.

Ayat di atas menjelaskan, taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul, dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan, dan taatlah kepada pemimpin sepanjang pemimpin tersebut tidak menyuruh seseorang berbuat dzalim. Dan apabila terdapat selisih paham tentang sesuatu maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Surah An-Nisaa' ayat 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri), kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”. (Q.S An-Nisaa’(4):83)

Ayat di atas menjelaskan apabila orang munafik mendengar sesuatu tentang orang Islam, baik terkait dengan keamanan dan kebahagiaan mereka, maupun terkait kesedihan dan ketakutan, maka orang munafik langsung menyebarkan. Seandainya mereka mau

mengembakikan masalah itu kepada Rasulullah SAW dan kepada para cendikian, niscaya para cendikianawan akan dapat menemukan penyelesaiannya.

Surah Al-‘Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Al-Imran (3):104)

Ayat di atas menjelaskan hendaklah di antara kalian (orang mukmin) ada yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma’ruf, yaitu sesuatu yang telah diketahui kebiakannya menurut syariat dan akal.

4. Kedudukan dan Wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd*

Kedudukan lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan Islam ternyata berbeda dengan para pakar hukum tata negara, secara substansi sama tetapi dalam stresing dan dalam kedudukannya terdapat perbedaan adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* atau lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan Islam yaitu:

- 1) *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* mempunyai kedudukan yang penting dalam pemerintahan Islam. Antara khalifah dan *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat.

2) *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* mempunyai kedudukan dalam pemerintahan yaitu sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih khalifah dan mengawal khalifah menuju kemaslahatan umat.

3) Jadi kedudukan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa ada intervensi dari khalifah.²⁹

b. Menurut Abl al-Wahab Abl al-Aziz as-Syisyani menyatakan tugas ulil amri yang termasuk di dalamnya *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* ada empat yaitu:

- 1) Mengatur perkara-perkara duniawi (*al-Isyaraf ala syuun al-dunya*).
- 2) Melindungi agama (*bimayah al-din*) dari keinginan pihak-pihak tertentu.
- 3) Melindungi wilayah Islam dari musuh yang datang dari luar.
- 4) Menjaga solidaritas umat Islam dan menghindarkannya dari berbagai macam bentuk pertikaian dan perpecahan.

c. Menurut imam Al-Mawardi kedudukan lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dalam ketatanegaraan Islam yaitu, kedudukan anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* ini setingkat dengan pemerintah, karena

²⁹ Frenki, *Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), H.35

majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara.³⁰

Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd adalah para tokoh, ulama, pemimpin suku yang mempunyai fungsi dan wewenang:³¹

- a) Pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-bai'at imam.
- b) Mengarahkan hidup masyarakat ke arah yang maslahat.
- c) Membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadits.
- d) Konsultasi imam dalam menentukan kebijakan.
- e) Mengawasi jalannya pemerintahan.³²

Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd adalah Al-ummah yang tersebut dalam Al-Qur'an yang memiliki wewenang konstitusional dan pengawasan atas para pejabat. Dengan adanya dasar *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawasan atas kewenangan eksekutif, terutama pemimpin tertinggi negara, ia hanya disebut dengan lafal Al-Ummah dan tugasnya terbatas pada dua hal. *Pertama*, mengajak kepada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat oleh musyawarah. Kedua,

³⁰ Bagus Setiawan, *Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyazah Dusturiyah*, (Skripsi Program Sarjana Syari'ah Dan Hukum, Bandar Lampung, 2017), H. 29-30

³¹ Abdul Khalik Farid, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat....*, Ibid, h. 82

³² Dzajuli, *Fiqh Siyazah....*, Ibid, h. 74

menindak para penguasa zalim, yakni para penguasa yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.³³ Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah Ali-'Imran ayat 104:

وَأُولَٰئِكَ ٱلْمُنكَرُونَ وَيَنْهَوْنَ ٱلْعُرُوفَ وَيَأْمُرُونَ ٱلْخَيْرَ إِلَىٰ يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُن
ٱلْمُفْلِحُونَ هُم

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.

Juga Allah SWT kemudian berfirman dalam surah Al-'Ashr ayat 1-3

وَٱلْعَصْرِ ۝١ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفَىٰ خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ
تَتَوَٰصَوْنَ بِٱلْحَقِّ وَتَوَٰصَوْنَ بِٱلصَّبْرِ ۝٣

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.

Selain itu juga *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* memiliki wewenang lainnya yaitu:

- (1) *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* memberikan masukan dan nasehat kepada khalifah dan tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakan.
- (2) Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa, secara masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, politik luar negeri, khalifah berhak merujuk pada pandangan majelis

³³ Abdul Khalik Farid, *Fikih Politik Islam...., Ibid*, h. 87

umat, namun dalam hal ini pandangan majelis umat tidak mengikat.

(3) Khalifah berhak menyodorkan undang-undang atau hukum yang hendak diadopsi kepada majelis, dan majelis berhak memberikan saran atau masukan serta menilai dan mengevaluasi meskipun tidak bersifat mengikat.

(4) *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* mempunyai wewenang mengoreksi tindakan real yang dilakukan oleh khalifah. Dalam hal ini koreksi *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dapat bersifat mengikat manakala dalam majelis terjadi consensus. Namun sebaliknya, koreksi tersebut tidak bersifat mengikat manakal didalam majelis belum atau tidak terjadi consensus. Jika diantara majelis berdasarkan hukum syara' maka dalam kondisi yang seperti nantinya keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat.

(5) *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* berhak menampakkan ketidaksukaannya kepada para mu'awin dan amil/ karena keputusan majelis dalam hal ini bersifat mengikat, maka khalifah segera memberhentikan mereka dan menggantikannya dengan anggota baru.

(6) *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* berhak membatasi kandidat calon khalifah sebagai wujud dari suksesi kekuasaan atau pemerintah.

(7) *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* memiliki hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada khalifah mengenai

kebijakan-kebijakan strategis yang berkenaan dengan kemaslahatan umum dan pertimbangan syara’.

(8) *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* berhak melakukan penyelidikan terhadap berbagai kebijakan yang dirasa bertentangan dengan *hukum syara’* meskipun dalam hal ini keputusan majelis tidak bersifat mengikat karena hal itu merupakan hak prerogatif.

(9) *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* mempunyai hak menyatakan pendapat.³⁴

Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-‘Imran ayat 110 yang berbunyi sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.³⁵ (Q.S Al-Imran (3):110)

Dan juga disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka

³⁴ Munawir Sadjali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990). H.64

³⁵ Al-Qur’an dan Terjemahnya.

*tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.*³⁶ (Q.S At-Taubah (9):122)

Tugas dari *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Menurut Rasyid Ridha, di samping *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* mempunyai hak pilih mereka juga berhak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. Sekalipun mereka mewakili rakyat, tetapi tidak identik dengan parlemen di zaman modern yang memiliki kekuasaan legislatif dan berhak membatasi kekuasaan kepala negara melalui undang-undang. Sementara khalifah adalah kepala negara yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sekaligus, tidak ada pemisahan kekuasaan. Al Mawardi juga berpendapat jika kepala negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama dan rakyat maka *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* berhak untuk menyampaikan mosi tidak percaya.³⁷

Menurut imam Al-Mawardi tugas *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* terbatas dalam dua hal, yaitu:

- (a) Mengajak pada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum dinataranya menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya.

³⁷ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat....*, Ibid., h.118-119.

- (b) Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditentukan.³⁸

Menurut Al-Maududi *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* memiliki tugas yaitu:

- (a) Jika terdapat petunjuk-petunjuk Allah dan Nabi-Nya yang eksplisit, maka lembaga ini yang berkompeten menjabarkan dan memuat peraturan-peraturan tersebut.
- (b) Bila terdapat kemungkinan beberapa penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk eksplisit itu, maka lembaga itu dapat memilih salah satu dari tafsiran tersebut dan merumuskannya kedalam undang-undang.
- (c) Jika tidak ada ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka lembaga dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat hukum Islam, dan apabila rumusan hukum yang baertalian dengannya terdapat dalam kitab-kitab fiqh, maka lembaga ini harus mengambil salah satunya.
- (d) Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber di atas, lembaga ini dapat berijtihad membuat hukum yang tak terbatas asalkan tidak bertentangan dengan semangat syariah.³⁹

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian tersebut digunakan untuk

³⁸ Muhammad Iqbal Dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group), h. 184

³⁹ *Ibid*, h. 185-186

membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. “Kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* Dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang MD3)”. Oleh Akmal Firdaus.

Dengan Metode Penelitian: Metode Kuantitatif dengan menggunakan data kepustakaan (*Library Research*) dan Pendekatan Yuridis.

Hasil Penelitian: *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* menurut Al-Mawardi orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiaat atau dinobatkan oleh mereka. Sedangkan kewenangan menurut al- Mawardi adalah melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap suatu hak dari hak-hak Allah. Selanjutnya kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* menurut Ibnu Taimiyah adalah orang-orang yang bertugas memilih imam dengan menggantikan hak pilih yang dimiliki rakyat dan sebagai lembaga permusyawaratan.⁴⁰

⁴⁰ Akmal Firdaus, “Kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* Dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan

2. “Perbandingan konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* dalam teori kenegaraan Islam dan konsep lembaga perwakilan dalam teori kenegaraan modern” oleh Mazdan Maftukha Assyayuti.

Metode Penelitian: Metode Normatif Kualitatif, dengan menggunakan data kepustakaan (*Library Research*) dan pendekatan komparatif atau perbandingan.

Hasil Penelitian: Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kecenderungan untuk dipersamakan dengan *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* hanya saja telah terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.⁴¹

3. “Tinjauan hukum Islam terhadap hak imunitas DPR-RI (studi Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD)” oleh Andriyansyah.

Metode Penelitian: Penelitian Kepustakaan (*library research*), bersifat deskriptif analitik, dengan analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif.

Hasil Penelitian: hukum Islam tidak mengatur tentang hak imunitas DPR RI atau disebut Islam *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* tetapi, secara tidak langsung al-Qur’an membahas tentang kebebasan berfikir, menyatakan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang MD3)”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Jakarta, Jakarta, 2015)

⁴¹ Mazdan Maftukha Assyayuti, “Perbandingan konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* dalam teori kenegaraan Islam dan konsep lembaga perwakilan dalam teori kenegaraan modern”.(Skripsi Program Sarjana Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018)

pendapat, berbicara dan bertindak yang hal ini merupakan ciri hak imunitas.⁴²

Dari ketiga judul di atas kita dapat melihat beberapa persamaan topik dan subjek penelitian yang sama yaitu lembaga perwakilan dan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*.

Adapun perbedaan dari ketiga judul penelitian diatas yaitu Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan Relevansinya terhadap Fungsi dan Tugas DPR Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Pertama*, judul penelitian ketiga di atas lebih bersifat umum, dan *kedua*, penelitian ini bersifat khusus sebab didasari oleh fiqh siyasah.

⁴² Andriyansyah, "Tinjauan hukum Islam terhadap hak imunitas DPR-RI (studi Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD)". (Skripsi program sarjana Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Khalik Farid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafik Group, 2005.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar Rhasyidin*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila Dan Undang-Undang, Relasi Dan Transformasi Kedua Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- B.N. Marbun, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Dedaptemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Kedua Edisi keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: AMZAH, 2005.
- Frenki, *Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Dalam Islam*, Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Hafidz Abdurrahman, *Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Cetakan Kedua, Jakarta: Qitshi Press, 2017.
- Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Iwan Satriawan, Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Rajagraindo Persada, 2016.

Iwan Satriawan, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013

Jubair Situmorang, *Politik Kewarganegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Kansil, C. S. T., Kansil, Cristine C. S., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, cet. Keempat, Jakarta: Bumi aksara, 2011.

Khairuddin, Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.

Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah*, Jakarta: Visi Media, 2008.

Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.

Max Boboy, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Prespektif Sejarah dan Tatanegara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008.

Muhammmad Iqbal, *Fiqh Siyasah, kontekstual Doktir Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Grupp, 2014.

Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gay Media Pratama, 2007.

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Muktar Pakpahan, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Semasa Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara, Suatu Kajian Khusus Tentang Kelembagaan Negara*, Jakarta: Permata Aksara, 2012.

Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

HRT. Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2014.

Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi kelima Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: 2015.

Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi terbaru Gramedia Press.

Ubaedillah dan Rozak Abdul, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education) Pancasila, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: PrenamediaGroup, 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Daerah.

Wikipedia, 1 Agustus, 2019.

Yusril Iza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia “Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian”*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Zuhraini, *Tata Negara Indonesia, Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Edisi Kedua (Bandar Lampung: Penerbit Fakultas Syari’ah 2017.

AL-‘ADALAH Vol. XI, No. 2 Juli 2013, Duski:Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syatibi (Suatu Kajian Konsep Al-Istiqla” Al-Ma’nawi), Diakses Dari <https://ejournal.radenintan.ac.id.html> tanggal 19 Desember 2019.

